



Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Sosial di Desa Pejambon, Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur

Versanudin Hekmatyar

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia, versahekmattyar@poltekesos.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Social Empowerment,
Tourism Development

How to cite:

Hekmatyar, Versanudin. (2021). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Sosial di Desa Pejambon, Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 6 (No. 2), 155-166.

Article History:

Received: 05-10-2021
Accepted: 25-12-2021
Published: 31-12-2021

ABSTRACT

The objective of this study is describing tourism village development based on social empowerment. By using qualitative approach, data was collected and presented descriptively. This study assumes that the development of the tourism sector can provide income potential to families in the village and complement each other with agriculture sector. Tourism is a sector that has experienced rapid growth over the last few decades while contributing to poverty reduction in rural areas. The tourism sector is considered as a potential means for socio-economic development and regeneration of rural areas. This study seeks to contribute an understanding of the tourism village development strategy formulated and implemented. The results are as follows social empowerment is a required for developing a sustainable tourism sector. Based on that thing, tourism village development strategy must consider several factors, including; participatory tourism planning, capacity building and empowerment, also the usefulness of rural tourism for the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan sosial. Data dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini mengasumsikan bahwa pengembangan sektor wisata dapat memberikan potensi pendapatan pada keluarga di desa yang saling melengkapi dengan sektor pertanian. Sektor wisata merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa dekade terakhir sekaligus memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan. Sektor wisata dianggap sebagai sarana potensial untuk pengembangan sosial-ekonomi dan regenerasi daerah pedesaan. Penelitian ini berusaha memberikan pemahaman tentang strategi pengembangan desa wisata dirumuskan dan dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan, pemberdayaan sosial merupakan syarat untuk mengembangkan sektor wisata secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, strategi pengembangan desa wisata harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain; perencanaan wisata partisipatif, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, serta kebermanfaatan desa wisata bagi masyarakat.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan desa selama ini seringkali menganut konsep “membangun desa” dimana faktor eksternal lebih berperan menentukan arah pembangunan desa yang konsekuensinya desa semakin tergantung pada bantuan pihak luar dan bukan pada “desa membangun” dimana peran masyarakat menjadi faktor utama untuk membangun desa yang berketahanan dan berkelanjutan. Kondisi ini, menempatkan desa sebagai sebuah entitas kehidupan diperlakukan sebagai obyek pembangunan. Akibatnya banyak terjadi tumpang tindih kegiatan yang bukannya memperkuat namun justru melemahkan desa. Lebih lanjut, program pembangunan memiliki kecenderungan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan tidak sejalan dengan pembangunan pada aspek sosial. Untuk itu, diperlukan pembangunan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal, dan dilakukan secara partisipatif dalam menentukan arah pembangunan. Mencermati hal tersebut, penting untuk mengharmonisasikan tujuan-tujuan dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sehingga mampu memberikan kebermanfaatan pada masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat miskin dan marginal di desa.

Midgley, (2013) mendefinisikan gagasan pembangunan sosial sebagai proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam konteks proses pembangunan yang dinamis dari semua pihak. Artinya, pembangunan sosial adalah sebuah strategi terencana atau sebuah desain program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tidak hanya dilakukan dalam satu aspek, tetapi juga dari semua aspek lainnya. Ini mencerminkan sifat multidisiplin kemajuan sosial dalam melaksanakan pembangunan. Desain pembangunan secara terencana dapat dilaksanakan salah satunya melalui pengembangan sektor wisata untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, sektor wisata merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa dekade terakhir sekaligus memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan. Hal ini telah diakui secara luas oleh pembuat kebijakan dan masyarakat. Sektor wisata telah lama dianggap sebagai sarana potensial untuk pengembangan sosial-ekonomi dan regenerasi daerah pedesaan, khususnya yang terkena dampak penurunan pada kegiatan pertanian. Dengan demikian, mendorong pertumbuhan sektor wisata di desa tidak hanya akan dapat meningkatkan perekonomian lokal namun juga peningkatan nilai sosial budaya dan pelestarian lingkungan. Pembangunan bersama masyarakat akan menjadikan pembangunan sektor wisata mengarah pada bentuk pariwisata hijau (*green tourism*) dengan tujuan mencapai perkembangan pariwisata yang berkelanjutan serta inklusif mengurangi dampak negatif bagi lingkungan hidup dan budaya setempat. Jenis-jenis minat wisata terkait langsung dengan hal ini antara lain wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata kreatif, dan wisata petualangan yang memiliki akar kuat pada sumber daya perdesaan. Dewi et al., (2013) menjelaskan desa wisata sebagai salah satu bentuk pembangunan sektor wisata berbasis masyarakat dengan tujuan keberlanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan.

Salah satu aspek penting dari desa wisata adalah untuk mendorong keterlibatan, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat. Pariwisata ibarat alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Sehingga, tujuan utama pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sosial sekaligus untuk tujuan pelestarian sumber daya dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sutawa, (2012) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan memiliki dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Secara empiris, Soekmadi & Kartodihardjo, (2010) menjelaskan bahwa ekowisata berperan dalam 4 indikator pengentasan isu kemiskinan, yaitu; memberikan kontribusi pada peningkatan level pendapatan masyarakat lokal, peningkatan jumlah masyarakat yang bekerja, perbaikan infrastruktur, dan partisipasi lokal.

Sutawa, (2012) juga menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dan marginal keluar dari kondisi yang tidak mendapat perhatian dan tidak berdaya. Lebih lanjut Sutawa, (2012) mendasarkan pemberdayaan memiliki empat elemen utama yaitu:

1. Akses ke informasi, informasi adalah modal dalam penciptaan ketergantungan. Komunitas yang memiliki informasi memadai akan memiliki posisi yang lebih baik dalam memanfaatkan peluang, lebih mudah untuk mendapatkan akses layanan, menggunakan hak-hak mereka, termasuk meminta tanggung jawab dari para pemangku kepentingan.
2. Partisipasi, peluang untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, baik itu perencanaan, implementasi atau pemanfaatan hasil sangat penting bagi masyarakat. Dengan partisipasi, semua keputusan dapat didasarkan pada pengetahuan lokal, kearifan lokal, serta prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, hal ini akan berakhir dengan komitmen masyarakat dalam proses pembangunan termasuk pengembangan pariwisata.
3. Akuntabilitas, semua pemangku kepentingan diperlukan, termasuk dalam mengembangkan peran, implementasi, atau segala jenis penggunaan sumber daya termasuk dana. Akuntabilitas harus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan

masyarakat, di sisi lain masyarakat juga dididik untuk mengembangkan akuntabilitas mereka di antara mereka.

4. Kapasitas kelembagaan. Proses pemberdayaan masyarakat harus terdiri dari pengembangan kemampuan kualitas, kemampuan untuk bekerja dalam tim, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan, serta memobilisasi sumber daya untuk mengantisipasi masalah. Komunitas akan dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka dalam kelompok daripada secara individu.

Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Artinya, pemberdayaan sosial ditujukan tidak saja pada mereka yang mengalami masalah sosial, tetapi lebih dari pada untuk mendorong potensi dan sumber daya yang ada, baik perorangan maupun lembaga agar berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Sehingga, pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha.

Mencermati hal tersebut, kebijakan pengembangan desa wisata diperlukan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah program akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hubungannya dengan masalah ini, pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola masalah pariwisata (Sutawa, 2012). Selain itu, pemerintah juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pengembangan Desa Wisata agar penyusunan kebijakan terkait pengembangan desa wisata dapat lebih fokus kepada hal-hal mendasar, seperti keselarasan program, kebutuhan masyarakat setempat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan sebagai penyelidikan untuk memahami bagaimana pengembangan desa wisata dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasar pada potensi lokal, sehingga dapat diarahkan kepada pemberdayaan sosial.

Pengembangan pariwisata pedesaan, khususnya, diharapkan memainkan peran penting dalam revitalisasi daerah pedesaan. Sektor wisata adalah sektor baru yang dianggap berkontribusi terhadap ekonomi, budaya sekaligus lingkungan. Sektor wisata diharapkan dapat memberikan alternatif pendapatan pada keluarga di desa yang saling melengkapi dengan pertanian dan dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosio-ekonomi utama yang disebabkan oleh ekonomi pasar dan modernisasi. Sebuah harapan untuk menciptakan lapangan kerja yang menawarkan alternatif pertumbuhan pendapatan selain dengan melakukan urbanisasi, sebagaimana kesimpulan yang disampaikan Wahyuni, (2018) dalam artikelnya yang menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak pada menurunnya jumlah migrasi dan mendorong munculnya berbagai lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

2. Metode

Penelitian yang mendasari artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Creswell, (2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting,

seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Pada penelitian ini kompleksitas persoalan yang mencoba untuk diterjemahkan adalah tentang pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan sosial dengan melakukan penelitian di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan sosial. Pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup empat aspek yang dinyatakan oleh Miles et al., (2013), yaitu: lokasi penelitian (*setting*), siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai (*actor*), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi), dan proses (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian). Data dan informasi pada penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemerintah desa, pengurus BUMDesa, masyarakat desa dan pengunjung.

3. Hasil dan Pembahasan

Objek dan Daya Tarik Wisata

Junaid, (2020) menyatakan bahwa segala potensi desa yang memiliki keunikan dan dapat menjadi daya tarik wisata menjadi alasan wisatawan untuk menjadikan desa sebagai tujuan melakukan perjalanan. Secara administratif, Desa pejambon terletak di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dan berada pada ketinggian 4 M diatas permukaan laut serta berada pada dataran rendah 15 mdpl (*lowland*), dengan curah hujan 233 mm/ tahun serta suhu harian berkisar 22°C sampai dengan 29 °C. Jarak antara Desa Pejambon dengan pusat kecamatan adalah 4 Km, dan jarak dengan pusat kabupaten adalah 20 Km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit, menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Pejambon sebagaimana desa-desa pada umumnya, memiliki karakteristik sebagai desa pertanian. Luas keseluruhan Desa Pejambon adalah 189 Ha dengan 117 Ha (61,90%) diantaranya adalah lahan pertanian/persawahan. Karakteristik Desa Pejambon sebagai desa pertanian menjadikan Desa Pejambon memiliki berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik agrowisata dan agroeduwisata. Selain itu, potensi wisata budaya juga sangat mungkin untuk dikembangkan. Daya tarik wisata disebut juga objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada Desa Pejambon, daya tarik wisata dihadirkan dengan tujuan menunjang peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan dituangkan kedalam arah dan kebijakan anggaran untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui desa wisata. "...pembangunan desa wisata sudah kami mulai sejak tahun 2018, direncanakan sampai tahun 2023. Terdapat lima objek wisata yang coba dikembangkan, semua masuk dalam arah dan kebijakan anggaran 2018-2023" (AM, Sekretaris Desa). Adapun objek dan daya tarik wisata di Desa Pejambon, antara lain;

1. Taman Desa atau dikenal dengan Taman Desa Bestari akronim dari “bersih sehat tertata rapi” merupakan gambaran wujud semangat dari masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan tempat indah dengan harapan taman ini menjadi tempat liburan bagi masyarakat Desa Pejambon dan sekitarnya, yang pada akhirnya dapat mengundang pengunjung untuk datang ke Taman Desa Bestari Desa Pejambon sehingga terjadi perputaran ekonomi di Desa Pejambon.
2. Museum pertanian, diharapkan menjadi wisata edukasi bagi masyarakat disekitar Desa Pejambon khususnya siswa sekolah agar mengetahui dan memahami perkembangan budaya dan teknologi pertanian dari waktu ke waktu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AM, sekretaris Desa Pejambon, *“harapannya museum ini bisa menjadi tempat belajar, khususnya siswa sekolah”*
3. Kebun binatang mini, harapannya dengan adanya kebun binatang mini mampu memberi warna berbeda. Kebun binatang dirancang berdasarkan masukan dari masyarakat yang berkeinginan untuk menghadirkan wisata menarik sekaligus dekat dengan sosio-kultural dimasyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan destinasi wisata ini lebih pada agrowisata, dimana pengunjung akan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan binatang-binatang yang ada. *“...konsepnya memang tidak akan sebesar kebun binatang pada umumnya, namun akan lebih ke agrowisata, dimana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan binatang-binatang yang ada”*. (AM, Sekretaris Desa).
4. Sanggar Sastrowidjoyo menawarkan atraksi kebudayaan yang diinisiasi oleh lembaga kebudayaan desa bersama BUMDesa. Tujuannya adalah membangkitkan kembali kesenian dan budaya yang perlahan mulai ditinggalkan bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. *“...sanggar adalah inisiasi dari lembaga kebudayaan desa, harapannya bisa menjadi tempat melestarikan sekaligus mempelajari budaya yang mulai dilupakan*. (AM, Sekretaris Desa).
5. Replika Rumah Mojopahit, berusaha menciptakan daya tarik wisata dengan menghadirkan nuansa jawa kuno khas kerajaan majapahit. Disini pengunjung berusaha untuk diajak Kembali menelusuri kebudayaan majapahit, mulai dari gerabah, pakaian, hingga makanan khas kerajaan. *“...hampir sama dengan objek lainnya, replika rumah*



Gambar 1. Master Plan Wisata Desa Pejambon

majapahit memang ditujukan untuk memberi edukasi sejarah kepada pada pengunjung, khususnya siswa-siswi sekolah” (AM, Sekretaris Desa).

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Pejambon mengembangkan strategi mata pencaharian dengan budidaya tanaman lahan kering, dan sawah tadah hujan. Mayoritas masyarakat desa terlibat di bidang pertanian. Komoditi yang ditanam antara lain jagung, kedelai, tembakau, dan padi untuk sawah tadah hujan. Mayoritas masyarakat adalah petani pemilik tanah (43,07%), dengan luasan lahan berkisar antara 0.1-2 hektar, dan (29,17%) masyarakat terlibat secara aktif di sektor pertanian, sebagai buruh tani dan pekerja harian lepas.

Ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian masih tinggi, dimana lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi masyarakat, sebagaimana modal dan tenaga kerja, serta terkait erat dengan sumber nafkah masyarakatnya (Hekmatyar & Nugroho, 2018). Selain pada sektor pertanian, masyarakat Desa Pejambon juga banyak yang melakukan urbanisasi dan masuk menjadi buruh dan karyawan pada sektor industri (24,25%), serta 29,17% masuk dalam kategori lainnya. Hasil wawancara dengan sekretaris desa menjelaskan bahwa *"...itu banyaknya remaja yang baru lulus sekolah, kerjanya biasanya serabutan tapi saat pendataan dilakukan mereka sedang tidak bekerja"* (AM, Sekretaris Desa). Dengan demikian, 29,17% masyarakat Desa Pejambon yang masuk dalam kategori lainnya pada struktur mata pencaharian adalah penduduk angkatan kerja, yakni penduduk dengan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Secara lengkap struktur mata pencaharian masyarakat berdasarkan kategori pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Struktur Mata Pencaharian Masyarakat

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Perangkat Desa	10	0,47%
2	PNS/TNI/Polri	40	1,87%
3	Petani	920	43,07%
4	Guru Non PNS	24	1,12%
5	Buruh	128	5,99%
6	Karyawan	389	18,21%
7	Tenaga Tukang	2	0,09%
8	Lainnya	623	29,17%
	Jumlah	2136	100,00%

Sumber: Profil Desa Pejambon, 2020.

Kelembagaan Pengelola Desa Wisata

Pengembangan desa wisata perlu didukung manajemen atau pengelola yang kompeten, dan memahami unsur-unsur lokalitas desa sebagai daya tarik utama usaha wisata. Hal diwujudkan salah satunya dengan membentuk kelembagaan yang solid, mandiri, dan melibatkan masyarakat secara luas, serta berbasis sumberdaya setempat. Kelembagaan pengelola wisata di Desa Pejambon dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa, serta dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, serta kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa diharapkan menjadi motor penggerak yang menggerakkan potensi desa menjadi sumberdaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan kapasitas manajemen, penciptaan iklim usaha yang sehat, perluasan akses pasar dan penyediaan sarana yang memudahkan masyarakat menciptakan produk dan layanan berdaya saing. Pada pengelolaan usaha wisata, BUMDesa mengambil peran aktif pada semua proses, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat secara aktif, sehingga menumbuhkan perasaan saling memiliki terhadap pengembangan wisata di Desa Pejambon.

Pemberdayaan Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata

Pemberdayaan sosial dalam pengembangan desa wisata merupakan suatu instrumen pembangunan sosial untuk meningkatkan peran masyarakat untuk mengelola desa wisata dan terlibat secara penuh dalam pengelolaan tersebut. Sutawa, (2012) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dan marginal keluar dari kondisi yang tidak mendapat perhatian dan tidak berdaya.

Pada pengembangan desa wisata ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan dimasa depan. Merumuskan desa wisata sebagai industri yang berkelanjutan, artinya bahwa sektor wisata di desa harus mampu untuk menetapkan perencanaan strategis, mengedepankan partisipasi pemangku kepentingan, dan mendukung peningkatan kesadaran publik serta mengembangkan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan sosial adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dilakukan melalui sektor wisata. Pemberdayaan sosial juga merupakan syarat untuk mengembangkan sektor wisata secara berkelanjutan. Pada penelitian ini, hal tersebut diamati melalui beberapa faktor yang dibutuhkan sebagai strategi pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan sosial, antara lain; perencanaan wisata partisipatif, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, serta kebermanfaatan desa wisata. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha menguraikan masing-masing faktor tersebut dan kaitannya dengan pemberdayaan sosial di Desa Pejambon.

a. Perencanaan Wisata Partisipatif

Pemberdayaan sosial, berkaitan erat dengan perencanaan program pembangunan yang disusun secara partisipatif bersama masyarakat. Konsep partisipasi sendiri telah berkembang menjadi kunci yang harus diperhatikan dalam menentukan perencanaan program pemberdayaan yang akan dilakukan. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat sendirilah yang seharusnya menentukan bentuk pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perencanaan desa wisata, dengan melibatkan masyarakat setempat dalam peran partisipatif terbukti berhasil untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai secara bersama. Sebagian besar karakteristik pariwisata berbasis masyarakat berasal dari tradisi perencanaan partisipatif, di mana kelompok kepentingan yang lemah dipertahankan dan masyarakat lokal diberi lebih banyak kontrol atas proses sosial yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga, kelembagaan pengelola desa wisata harus mampu mengakomodir aktor yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda menuju kepentingan bersama; misalnya, dapat membedakan aktor pertanian, pariwisata, perdagangan dan kerajinan tangan. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah sektor di mana para aktor termasuk: negara, swasta atau masyarakat sipil dalam hal pengaturan tata kelola. Salah satu prinsip utama untuk perencanaan partisipatif adalah bahwa orang dalam memiliki keahlian dapat berkontribusi dalam sebuah pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Hubungan antar aktor dan pemangku kepentingan harus dirumuskan secara jelas dan terarah, baik peran maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata berperan penting sejak perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan. Pada prinsipnya, bentuk partisipasi masyarakat yaitu mengelola sumber daya wisata yang ada. Selain mengelola, masyarakat juga merupakan pihak yang menerima manfaat dari adanya desa wisata. Sehubungan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, modal sosial adalah perspektif yang paling umum diambil.

Pendekatan ini menerima banyak perhatian dalam menanggapi kekurangan yang jelas dari penekanan ekonomi tradisional pada pengembangan pariwisata. Salah satu pendukungnya yang paling aktif adalah Murphy, (1985) yang menekankan strategi berfokus pada pengidentifikasian tujuan dan keinginan komunitas tuan rumah dan kapasitas untuk menyerap pariwisata. Menurut Murphy, setiap komunitas seharusnya mengidentifikasi tujuan mereka sendiri dan mengejar pariwisata sejauh memenuhi kebutuhan lokal. Gaya perencanaan ini mengakui bahwa pertimbangan sosial dan lingkungan perlu dimasukkan dalam perencanaan dan bahwa pariwisata harus memberi manfaat pada pengunjung dan masyarakat lokal. Midgley, (2013) menjelaskan bahwa proses perencanaan biasanya melibatkan rentetan Langkah-langkah yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah yang dicari oleh perencana untuk memenuhi dan menetapkan target operasional yang akan dicapai.

Adapun arah dan kebijakan pengembangan Desa Wisata Pejambon memuat diantaranya 1) penentuan tujuan perencanaan pembangunan desa wisata yang disesuaikan dengan Renstra Desa Pejambon dan RPJMD Kabupaten Bojonegoro; 2) Pemetaan dan analisis data terkait potensi dan pengembangan daya tarik wisata dengan menghimpun aspirasi dari para stakeholder; 3) Koordinasi dengan para stakeholder, hal ini dilakukan sebagai upaya memaparkan potensi aktual untuk pengembangan daya tarik wisata dan identifikasi pemecahan masalah dalam proses perencanaan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas diantara alternatif pilihan yang diperoleh dari usulan; 4) Penyusunan rencana program dan kegiatan. Pada tahap ini disusun perencanaan yang sesuai dengan potensi, dan kebutuhan masyarakat 5) Pelaksanaan program dan kegiatan; 6) Monitoring dan evaluasi.

Meskipun tidak menyentuh langsung setiap lapisan masyarakat, perencanaan secara partisipatif mempengaruhi kesejahteraan dengan selalu berupaya meningkatkan kualitas program-program pembangunan yang dilakukan. Pada gilirannya, perencanaan partisipatif merupakan sebuah cara untuk memperkuat demokrasi lokal di desa, sekaligus upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam menentukan program-program mereka secara mandiri sebagai sebuah pembangunan yang berpusat pada orang (*people centered development*).

b. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan

Peningkatan kapasitas merupakan bagian yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan sosial. Proses peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sosial pada pengembangan desa wisata di Desa Pejambon dilakukan melalui tiga tahapan, yakni melalui penyadaran diri, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan. Pada tahap pertama, penyadaran diri diawali dengan sosialisasi pada masyarakat Desa Pejambon tentang rencana pengembangan desa wisata. Sosialisasi dilakukan sekaligus untuk menghimpun masukan dari masyarakat terkait pengembangan desa wisata. Kemudian, dilanjutkan dengan membuka ruang diskusi tentang peluang-peluang usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat dari adanya pengembangan desa wisata. Terakhir pada tahap ini adalah pembentukan kelompok sadar wisata, sebagai wadah untuk berbagi informasi dan menyampaikan gagasan tentang desa wisata.

Tahap kedua adalah peningkatan kapasitas, dilakukan sebagai sebuah usaha transformasi kemampuan dan keterampilan. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan inisiatif dan menghasilkan inovasi untuk mencapai kemandirian sehingga dapat berperan aktif di dalam pembangunan, khususnya desa wisata. Peningkatan kapasitas selanjutnya dilakukan pada tataran kelembagaan komunitas, individu, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas pada kelembagaan dilakukan dengan tujuan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat sehingga mampu mewadahi gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk tujuan pengembangan desa wisata. Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi usaha untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang disepakati menyangkut pola perilaku masyarakat dimana output dari usaha ini adalah terbentuknya tata nilai dan aturan dalam kelompok sadar wisata berbasis komunitas. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial sebagai upaya mewujudkan tata kelembagaan yang lebih kompeten, partisipatif dan transparan. Sedangkan, untuk peningkatan kapasitas individu lebih condong pada usaha untuk meningkatkan kemampuan individu masyarakat agar mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat sekitarnya. Peningkatan kapasitas individu yang dilakukan meliputi usaha-usaha pembelajaran dan pelatihan pada pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Tahap selanjutnya, adalah pemberdayaan. Tahap pemberdayaan merupakan tahap lanjutan, dimana Midgley, (2013) menyebut pemberdayaan sebagai pengambil-alihan kuasa untuk mengendalikan atau mempengaruhi sebuah pembangunan. Artinya, masyarakat telah mampu dalam menentukan program-program mereka secara mandiri sebagai sebuah pembangunan yang berpusat pada orang (*people centered development*). Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah suatu kondisi yang berhenti pada sebuah titik tertentu saat tujuan pengembangan itu dinyatakan tercapai, namun merupakan siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus berkembang dan ketika tujuan telah mencapai, maka akan muncul tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks dan lebih berat. Pemberdayaan biasa diawali dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan maupun kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha di area obyek wisata. Pada gilirannya, masyarakat diharapkan akan berdaya dan mampu

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

c. Kebermanfaatan Desa Wisata

Fitari & Ma'rif, (2017) mengungkapkan pengembangan desa wisata harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan pelayanan bagi warganya. Mengingat pentingnya fungsi ekonomi dalam pengembangan desa wisata, maka tantangan yang dihadapi oleh perumus kebijakan adalah bagaimana memberikan nilai yang komprehensif terhadap desa wisata tersebut. Harus diperhatikan bahwa nilai yang terkandung dalam pengembangan desa wisata tidak saja berupa nilai pasar, tetapi juga melekat nilai-nilai sosial budaya didalamnya. Nilai-nilai ini seringkali tidak terkuantifikasi dalam perhitungan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, penting untuk membuka ruang alternatif bagaimana posisi dan peran masyarakat dalam lingkungan sosial dinegosiasikan dalam konteks struktur yang lebih besar (Hekmatyar & Adinugraha, 2021).

Nilai ekonomi pada umumnya lebih mudah untuk diketahui dan dihitung berdasarkan penilaian harga pasar. Sebaliknya, nilai sosial budaya sulit diketahui secara pasti nilainya. Darusman, dkk (2009), menyebutkan dalam usaha ekowisata nilai merupakan makna tentang suatu objek bagi seseorang pada tempat dan waktu tertentu. Kegunaan, manfaat, kepuasan, dan rasa senang merupakan makna yang diperoleh dari suatu objek wisata. Ukuran nilai ini dapat diapresiasi diantaranya dengan waktu, tenaga, uang, dimana seseorang bersedia memberikannya untuk memperoleh atau memiliki makna tersebut.

Dengan demikian, untuk mengetahui kebermanfaatan desa wisata bagi masyarakat Desa Pejambon tidak cukup jika hanya dilakukan perhitungan secara ekonomi tanpa memasukan fungsi sosial budaya didalamnya. Jika secara ekonomi dapat dilihat secara langsung dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dan benefit yang diperoleh sektor usaha dengan adanya desa wisata. Secara sosial budaya harus dilihat dengan lebih hati – hati kebermanfaatannya, diantaranya adalah seberapa besar manfaat yang diperoleh dari pengembangan desa wisata untuk pelestarian budaya, pendidikan, dan keberlanjutan lingkungan di Desa Pejambon. Pada prinsipnya, desa wisata harus dijalankan oleh masyarakat sebagai pihak pengelola, sekaligus pihak penerima manfaat dari adanya desa wisata. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata dari awal hingga akhir. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kelestarian, dan keberlanjutan.

4. Kesimpulan

Penelitian yang mendasari artikel ini berusaha memberikan gambaran dan pemahaman tentang pengembangan desa wisata dirumuskan dan dilaksanakan sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Setidaknya terdapat empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pengembangan desa wisata. Pertama, pembangunan desa wisata harus

memiliki karakteristik yang berbeda dengan berlandaskan kekhasan budaya dan daya tarik wisata dari desa tersebut. Kedua, kegiatan pengembangan desa wisata harus bertanggung jawab, artinya bahwa semua pelaku kegiatan pariwisata harus bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pariwisata terhadap kesejahteraan, lingkungan alam dan budaya. Ketiga, tujuan pengembangan desa harus memberikan dukungan terhadap usaha-usaha meningkatkan ekonomi masyarakat, kelestarian, dan keberlanjutan. Keempat, pengelola desa wisata harus memiliki kelembagaan yang dinamis sehingga memungkinkan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan desa wisata dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117–226. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Fitari, Y., & Ma'rif, S. (2017). Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 5.
- Hekmatyar, V., & Adinugraha, A. G. (2021). Ancaman Keberfungsian Sosial Pada Masyarakat Di Dalam Kawasan Konservasi: Studi Kasus Desa Ranupani Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 28–41. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.464>
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). Badan usaha milik desa dan pembangunan sosial di kabupaten bojonegoro. *Sosio Konsepsia*, 7(3), 176–189. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i3.1444>
- Junaid, I. (2020). Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Wisata: Studi di Kampung Nelayan, Tanjung Binga, Kabupaten Belitung. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 4(2), 60–71. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.47>
- Midgley, J. (2013). *Social Development: Theory and Practice*. SAGE Publications Ltd.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook: An Expanded Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications Ltd.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A Community Approach*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203068533>
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Soekmadi, R., & Kartodihardjo, H. (2010). Strategi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. 16(3), 148–154. <https://doi.org/10.7226/jtfm.16.3.%p>
- Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme ?Innovation and Sustainability in SME Development? (ICSMED 2012)*, 4, 413–422. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5)
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084>